

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

Imam Suryadi,
imamsuryadi3@gmail.com,
Universitas Wijaya Putra
Aminatuzzuhro
aminatuzzuhro@uwp.ac.id
Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of good governance and government accounting standards to financial accountability with organizational commitment as a moderator. The population in this study is the financial section of the regional apparatus organization (OPD) of Surabaya city as many as 22 OPDs. Each of the population represented by 5 respondents namely head of finance, treasurer, finance staff, procurement department, and budget user. The questionnaire distributed to 87 respondents, and successfully collected with complete answers obtained from the method of purposive sampling. Methods of data analysis used in the study is analysis multiple regression and moderated regression analysis (MRA) with the help of SPSS version 20.0 software. The results of the research indicated that organizational commitment is able to partially moderate the influence of good governance and government accounting standards on financial accountability with regression coefficients of 51.9% and 36.8%. This indicates that organizational commitment as a moderating variable is able to strengthen the relationship of the influence of good governance and government accounting standards on financial accountability by 0.067 or 6,7%.

Keywords: Financial Accountability, Organizational Commitment, Tranparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya sebanyak 22 OPD. Setiap populasi diwakili oleh 5 responden yaitu kepala bagian keuangan, bendahara, staf keuangan, pejabat pengadaan barang dan pengguna anggaran. Kuesioner dibagikan kepada 87 responden dan berhasil dikumpulkan dengan jawaban lengkap yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi (MRA) yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi secara parsial pengaruh *good governance* dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan dengan koefisien regresi masing-masing sebesar 51,9% dan 36,8%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan pengaruh *good governance* dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 0,067 atau 6,7%.

Kata kunci: Akuntabilitas keuangan, komitmen organisasi, transparansi, *good governance*

I. PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi menjadi sebuah tonggak diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, dimana misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah menyerahkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).

Konsekuensi dari penyerahan wewenang ini yaitu pemerintah daerah harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan segala potensi yang dimiliki secara transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang besar atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah guna mempercepat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014 artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur pengelolaan keuangannya secara mandiri. Salah satunya pengelolaan anggaran dana terkait pelayanan publik. Pemerintah dapat dengan leluasa melakukan kecurangan terhadap pengelolaan dana tersebut. Terbukti dari masih banyak ditemukannya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi akibat tindakan penyelewangan dana anggaran. Hal ini tentu saja wajar jika kemudian muncul rasa

ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ataupun kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah setempat, yang seolah hanya berorientasi pada kepentingan pejabat pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik agar pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan keuangan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian tujuan utama dari organisasi sektor publik dapat segera terwujud.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui gambaran pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi, 2) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh good governance terhadap akuntabilitas keuangan, 3) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan, 4) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh good governance terhadap akuntabilitas keuangan, 5) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan.

II. TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship*

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Akuntabilitas Keuangan

Nurhakim (2014) dalam Febriansyah, Mukhzarudfa, & Arum (2018) mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi informasi

membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perubahan-perubahan yang telah dan sedang terjadi menuntut terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Menurut LAN dan BPKP (2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Good Governance

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam

memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Standar Akuntansi Pemerintah

Halim & Kusufi (2012) menjelaskan bahwa Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Komitmen Organisasi

Mowday (1979) dalam Ilahi, Mukzam, & Prasetya (2017) menyebut komitmen kerja sebagai istilah lain dari komitmen organisasional. Selain itu juga komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan pegawai, mengidentifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi, dan mengetahui keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi serta bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi serta mampu menerima norma-norma yang ada dalam perusahaan tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

H1 : Good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

H2:Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan.

H3:Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

H4:Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara standar akuntansi

pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 4 Badan Daerah, dan 22 Dinas daerah. Namun dalam penelitian ini, peneliti memilih dinas daerah sebagai sampel penelitian. Alasan dipilihnya dinas daerah yaitu karena dinas merupakan OPD yang secara langsung memberikan pelayanan publik melalui program dan kegiatannya secara teknis.

Responden dalam penelitian adalah kepala bagian keuangan, bendahara, staf keuangan, pejabat pengadaan barang dan pengguna anggaran. Sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen yaitu *Good Governance* (X_1) dan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2); 1 Variabel dependen yaitu Akuntabilitas Keuangan (Y) dan 1 variabel moderasi yaitu Komitmen Organisasi (M).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Untuk variabel *Good Governance* (X_1) instrumen yang digunakan untuk memperoleh data terdiri dari 10 pernyataan dengan indikator pengukuran menggunakan dimensi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Zeyn, 2011). Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) terdiri dari 12 pernyataan dengan proksi pengukuran menggunakan dimensi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Zeyn, 2011). Variabel Komitmen Organisasi (M) terdiri dari 15 pernyataan dengan proksi pengukuran menggunakan dimensi *affective commitment*, *continuence commitment*, dan *normatif commitment* (Zeyn, 2011). Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) terdiri dari 18 pernyataan dengan proksi pengukuran menggunakan dimensi penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan

kegiatan, evaluasi kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn, 2011).

Masing-masing proksi tersebut diukur menggunakan skala *likert* dengan rentang nilai 1-4.

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2017). Kemudian, sebelum melakukan pengujian analisis data, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi (Sugiyono, 2017).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan depenelitianatasvariabel - variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa jumlah data pada penelitian ini sebanyak 87 data. Variabel *good governance* memiliki angka minimum 30 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata variabel *good governance* sebesar 36,23 dengan standar deviasi sebesar 3.090.

Variabel standar akuntansi pemerintah memiliki angka minimum 36 dan nilai maksimum sebesar 48. Nilai rata-rata variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 42,23 dengan standar deviasi sebesar 4,358.

Variabel komitmen organisasi memiliki angka minimum 45 dan nilai maksimum sebesar 60. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan sebesar 50,32 dengan standar deviasi sebesar 4,987.

Berikut tabel hasil uji statistik deskriptif :

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Good Governance Standar Akuntansi Pemerintah	87	30	40	36,23	3,090
Komitmen Organisasi	87	36	48	42,23	4,358
Good Governance* Komitmen Organisasi	87	45	60	50,32	4,987
Standar Akuntansi*Komitmen Organisasi	87	1350	2400	1826,09	260,111
Akuntabilitas Keuangan	87	1620	2880	2135,53	375,038
Valid N (listwise)	87	54	72	65,76	4,747

Sumber: Output SPSS 20

Variabel interaksi antara good governance dengan komitmen organisasi memiliki angka minimum 1.350 dan nilai maksimum sebesar 2.400. Nilai rata-rata variabel ini sebesar 1826,09 dengan standar deviasi sebesar 260,111. Variabel interaksi antara standar akuntansi pemerintah dengan komitmen organisasi memiliki angka minimum 1620 dan nilai maksimum sebesar 2880. Nilai rata-rata variabel ini sebesar 2135,53 dengan standar deviasi sebesar 375,038.

Variabel akuntabilitas keuangan memiliki angka minimum 54 dan nilai maksimum sebesar 72. Nilai rata-rata variabel akuntabilitas keuangan sebesar 65,76 dengan standar deviasi sebesar 4,747.

Pengujian keabsahan data penelitian untuk masing-masing variabel menunjukkan hasil yang valid dan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai		Kriteria
	r _{hitung}	r _{tabel}	
Good Governance	0,837	0,213	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,854		Reliabel
Komitmen Organisasi	0,937		Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,867		Reliabel

Sumber: Ouput SPSS 20 (Data diolah)

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean 0E-7 Std. Deviation 3,21870519
Most Extreme Differences	Absolute ,058 Positive ,041 Negative -,058
Kolmogorov-Smirnov Z	,544
Asymp. Sig. (2-tailed)	,928

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa besarnya nilai statistik Kolmogorov Smirnov adalah 0,544. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka dari tabel diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. sebesar 0,928 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual yang dianalisis terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *VarianceInflation Factor* (VIF) . Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2013). Berikut ini tabel hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	4,797	,000		
Good Governance	6,429	,000	,809	1,236
1 Standar Akuntansi Pemerintah	3,948	,000	,642	1,558
Komitmen Organisasi	-1,217	,227	,763	1,310

Sumber: Output SPSS 20 (Data diolah)

Dari hasil olah data yang terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa tidak ada terjadi masalah multikolinieritas dalam model. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF yang lebih kecil dari 10 untuk semua variabel yang diamati.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terapat korelasi atau hubungan antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam model regresi. Berikut ini tabel hasil uji autokorelasi :

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,735 ^a	,540	,524	3,276	1,751

- a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Output SPSS 20

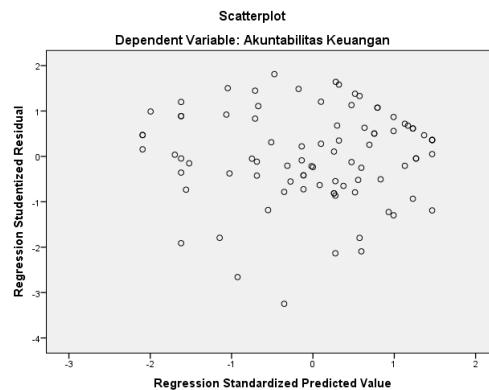
Berdasarkan nilai tabel Durbin Watson, diketahui bahwa nilai dU untuk jumlah data 87 dan jumlah variabel independen 1 yaitu 1,721 sehingga nilai 4-dU sebesar 2,279. Nilai DW berada diantara dU dan 4-dU. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varians residual tidak

homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode Scatterplot. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 20

Dari gambar tersebut di atas, dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan heterokedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada titik-titiknya. Titik-titiknya juga menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, kondisi ini menunjukkan tidak terjadinya heterokedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis penelitian dilakukan pengujian terhadap 4 persamaan regresi. Secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t dengan kriteria tingkat signifikansi hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel uji kurang dari 0,05 (Ghozali, 2013).

Good Governance Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Tabel 7. Hasil Uji t Persamaan 1

Sumber: Output SPSS 20

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28,363	4,486		6,322	,000
1 Good Governance	1,032	,123	,672	8,366	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,366 dan nilai t_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)=n – 2= 87 – 2= 85 adalah sebesar 1,992. Maka dari hasil perbandingan nilai tersebut dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} . Selanjutnya, jika dilihat dari nilai *probabilitas* (*p-value*) yang diperoleh dari hasil uji di atas, maka dapat diketahui pula bahwa *p-value* memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai alpha (0,000 < 0,05).

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis I diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2017) dan Rinaldi (2016) yang membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Tabel 8. Hasil Uji t Persamaan II Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	40,530	4,194		9,664	,000
Standar Akuntansi Pemerintahan	,597	,099	,548	6,047	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan
 Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,047 dan nilai t_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)=n – 2= 87 – 2= 85 adalah sebesar 1,992. Maka dari hasil perbandingan nilai tersebut dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} . Selanjutnya, jika dilihat dari nilai *probabilitas* (*p-value*) yang diperoleh dari hasil uji di atas, maka dapat diketahui pula bahwa *p-value* memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai alpha (0,000 < 0,05).

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis II diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan Rinaldi (2016) yang membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Antara Good Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Tabel 9. Hasil Uji t Persamaan III Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	200,042	51,814		3,861	,000
Good Governance	-3,679	1,401	-2,395	2,627	,010
Komitmen Organisasi	-3,512	1,060	-3,689	3,313	,001
Moderasi 1	,096	,029	5,273	3,365	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan
 Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,365 dan nilai t_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)=n – 2= 87 – 2= 85 adalah sebesar 1,992. Maka dari hasil perbandingan nilai tersebut dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} . Selanjutnya, jika dilihat dari nilai *probabilitas* (*p-value*) yang diperoleh dari hasil uji di atas, maka dapat diketahui pula bahwa *p-value* memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai *alpha* (0,001 < 0,05).

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis III diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan Zeyn (2011) yang membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi

Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Antara Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Tabel 10. Hasil Uji t Persamaan IV
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	187,380	53,062		3,531	,001
Standar Akuntansi Pemerintah	-2,606	1,205	-2,393	-2,164	,033
Komitmen Organisasi	-3,051	1,084	-3,205	-2,815	,006
Moderasi	,066	,024	5,252	2,722	,008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan
Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,772 dan nilai t_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)=n – 2= 87 – 2= 85 adalah sebesar 1,992. Maka dari hasil perbandingan nilai tersebut dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} . Selanjutnya, jika dilihat dari nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dari hasil uji di atas, maka dapat diketahui pula bahwa *p-value* memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai *alpha* (0,008 < 0,05).

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis IV diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan Rinaldi (2016) yang membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dengan nilai koefisien beta sebesar 1,032 yang menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif signifikan

terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan Rinaldi (2016) yang membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya bahwa ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka akan memberikan dampak yang positif dalam sisi pertanggung jawaban atas penggunaan dana publik.

Dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel, Organisasi Perangkat Daerah Surabaya berusaha untuk mengimplementasikannya melalui pelaksanaan tiga pilar *good governance* yaitu transparansi informasi keuangan dan non keuangan, mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui peran DPRD sebagai legislatif, para akademisi dalam membantu membuat kajian, sistem dan prosedur keuangan daerah, aset daerah dan lainnya.

Secara periodik mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah baik ditingkat Dinas sampai pemkot Surabaya dalam bentuk LKPD yang selanjutnya akan diaudit oleh inspektorat wilayah, BPKP dan BPK wilayah Surabaya. Pemkot Surabaya sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,597 yang menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan Rinaldi (2016) yang membuktikan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pemahaman dan implementasi SAP sangat mempengaruhi laporan keuangan, ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak kredibel, transparan dan berdaya banding. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kinerja pemkot Surabaya karena pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemkot Surabaya. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Surabaya sendiri menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut mulai tahun 2015 hingga 2018. Hal itu membuktikan bahwa pemkot Surabaya telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Setiap informasi yang dihasilkan oleh setiap OPD akan di laporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Surabaya yang selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi LKPD dan akan disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya untuk mendapatkan pengesahan melalui Perda APBD. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kewajiban pemkot kota Surabaya untuk mempertanggungjawabkan atas

penggunaan APBD dalam penyelenggaraan pembangunan dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.

Dilakukan evaluasi kinerja keuangan dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan atas penggunaan anggarannya oleh setiap dinas di kota Surabaya. Evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga untuk mengetahui capaian dari program dan kegiatan yang dilakukan.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi memperkuat pengaruh good governance terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Moderasi 1 sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh good governance terhadap akuntabilitas keuangan.

Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Interaksi antara good governance dengan komitmen organisasi bersifat memperkuat pengaruh good governance terhadap akuntabilitas keuangan. Hal tersebut dapat diketahui dengan nilai koefisien determinasi atau R-Square dimana nilai R-Square pada pengujian pertama (tidak menggunakan variabel moderasi) sebesar 0,452 atau 45,2%. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai R-Square pada pengujian kedua (menggunakan variabel komitmen organisasi sebagai moderasi) yaitu sebesar 0,519 atau 51,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh good governance terhadap akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan

Zeyn (2011) yang membuktikan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan.

Pada pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan lebih bertanggungjawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah. Aparat akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga berdampak pada kinerja aparat dalam rangka mewujudkan good governance (Zeyn (2011), Salamah (2017)).

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi memperkuat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Moderasi 2 sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan.

Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Interaksi antara standar akuntansi pemerintah dengan komitmen organisasi bersifat memperkuat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Hal tersebut dapat diketahui dengan nilai koefisien determinasi atau R-Square dimana nilai R-Square pada pengujian pertama (tidak menggunakan

variabel moderasi) sebesar 0,301 atau 30,1%. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai R-Square pada pengujian kedua (menggunakan variabel komitmen organisasi sebagai moderasi) yaitu sebesar 0,368 atau 36,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Salamah (2017) dan Rinaldi (2016) yang membuktikan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Salah satunya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara konsisten untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin baik komitmen organisasi dalam mewujudkannya maka akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan pada setiap organisasi perangkat daerah.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka adapun kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan ini yang telah dikemukakan, dapat diuraikan sebagai berikut

1. Hasil penelitian menunjukkan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya semakin tinggi penerapan good governance maka akan semakin baik dan meningkat pula akuntabilitas keuangannya.
2. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya komitmen untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan standar akuntabilitas keuangan.
3. Komitmen organisasi sebagai pemoderasi good governance berpengaruh terhadap

akuntabilitas keuangan. Dimana semakin tinggi good governance yang diperkuat oleh komitmen organisasi maka akan semakin tinggi dan meningkat pula akuntabilitas keuangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rasa tanggung jawab yang besar pada diri pegawai untuk meningkatkan penerapangood governance dan dengan sungguh-sungguh akan mengoptimalkan pelaksanaan good governance yang nantinya akan meningkatkan akuntabilitas keuangan tersebut.

4. Komitmen organisasi sebagai pemoderasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan standar akuntansi pemerintah yang baik, akuntabilitas keuangan juga akan menjadi baik, karena standar yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi diantaranya:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya
 - a. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan jumlah sampel dan memperluas wilayah penelitian sehingga tingkat generalisasi lebih tinggi.
 - b. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
 - c. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
2. Saran untuk Pemerintah Kota khususnya Dinas Daerah
Pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan lagi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya pada prinsip transparansi yang penerapannya sudah

cukup baik, dengan cara selalu mempublikasikan profit, kegiatan-kegiatan, sarana dan prasarana serta jasa/pelayanan melalui alat-alat komunikasi seperti website pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mendorong berlangsungnya hal tersebut diperlukan pula suatu komitmen dari masing-masing organisasi agar dapat berjalan secara kontinyu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Musadieg, M. A., & Mukzam, M. D. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT. Pelindo Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Arianti, N. P., & Putra, I. P. (2018). Pengaruh Profitabilitas Pada Hubungan Corporate Social Responsibility & Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Vol. 24 No. 1*.
- Aulia, V. (2015). *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Kabupaten Tanah Datar [Penelitian]*. Riau: Universitas Negeri Riau.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP, & LAN. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Febriansyah, S., Mukhzarudfa, & Arum, E. D. (2018). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Tinjauan Dari Perspektif Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Studi Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Universitas Jambi*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Akrua* 8 (1), 72-102.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8*.
- Hasbie, S. P., Faslah, R., & Swaramarinda, D. R. (2016). Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Keinginan Bepindah: Studi Pada Karyawan Pahala Express Jatiasih Bekasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 1*.
- Ilahi, D. K., Mukzam, M. D., & Prasetya, A. (2017). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja dan Komitmen Organisasional (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa*.
- Kesuma, D. P., Anwar, C., & Darmansyah. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika Vol. 1 No. 2*.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior Buku 1 edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lewier, C. N., & Kurniawan, C. H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya*.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 3 No. 2*, 236-253.
- Permadi, A. D. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat) [Penelitian]*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Rahayuningtyas, & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 4*, 431-450.
- Ramon, D. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan . *Artikel Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Rinaldi, R. R. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Roviyantie, D. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah [Penelitian]*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Salamah, U. (2017). Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen

- Organisasi sebagai Pemoderasi. *JOM FEKON Vol. 4 No. 2*.
- Sancaya, I. G. (2017). Pengaruh Karakteristik Personal dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Pengerajin Kain Tenun Endek di Pelangi Traditional Weaving Sidemen Tahun 2016. *e-Journal Jurusan Pendidikan Ekonomi Vol. 10 No. 2*.
- Santoso, E. B. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Lampung Timur) [Tesis]*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Saryanto, & Amboningtyas, D. (2017). Pengaruh Rotasi Kerja, Stres, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Ace Hardware Semarang). *Journal of Management*.
- Saryanto, & Amboningtyas, D. (2017). Pengaruh Rotasi Kerja, Stres, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Ace Hardware Semarang). *Journal of Management*.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) Edisi Pertama*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Andi.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamara, D. V. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan) [Penelitian]*. Riau: Universitas Negeri Riau.
- Wijaya, R. M. (2009). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penilaian Kinerja terhadap Kepuasan Kerja pada Karyawan Bagian Bengkel PT. PAL di Surabaya*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Winidyaningrum, C. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). *Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret*.
- Yolanda, S. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderating. *JOM FEB Vol. 1 Edisi 1*.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No. 1, 22-37*.
- Peraturan Pemerintah, No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah Daerah*
- UU No. 23 Tahun 2014